

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	28
C. Tujuan Penelitian	28
D. Kegunaan Penelitian	29
1. Teoritis	29
2. Praktis	29
E. Kerangka Pemikiran	29
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Kepastian Hukum menurut Hans Kelsen	29
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Hukum Responsif oleh Nonet dan Selznick	31
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Perlindungan Konsumen Pemikiran Vogel	33
F. Penelitian Terdahulu	39
BAB II: TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM PENYELESAIAN	
SENKGETA KONSUMEN DI INDONESIA	42
A. Teori Putusan Hakim	42
1. Dasar Hukum Putusan Hakim	44
2. Proses Pembuatan Putusan.....	46
3. Kekuatan Hukum Putusan	48
4. Upaya Hukum.....	49
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim	52
1. Putusan Akhir	52
2. Putusan <i>Condemnatoir</i>	53

3. <i>Putusan Constitutif</i>	54
4. <i>Putusan Declaratoir</i>	54
C. Penyelesaian Sengketa Konsumen	55
1. Kewenangan BPSK	60
2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa	62
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	63
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa	64
D. Perlindungan Konsumen	65
1. Hak-Hak Dasar Konsumen.....	66
2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Bisnis	69
3. Tanggung Jawab terhadap Kerugian yang Ditimbulkan	70
E. Lembaga Penegak Perlindungan Konsumen	70
1. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	71
2. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen.....	71
3. Perlindungan terhadap Praktik Bisnis yang Tidak Adil	72
4. Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha yang Melanggar	73
5. Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan	73
6. Peraturan Terkait Pengawasan dan Penegakan Hukum	74
7. Peraturan Pelengkap dan Sektoral.....	74
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	76
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	76
B. Sumber dan Jenis Data Penelitian	76
1. Bahan Hukum Primer	76
2. Bahan Hukum Sekunder	77
3. Bahan Hukum Tersier	78
C. Teknik Pengumpulan Data	79
1. Studi Pustaka.....	79
2. Studi Kasus	79
D. Teknik Analisis Data	80
1. Unitisasi	80

2. Klasifikasi	81
3. Analisis	82
4. Menarik Simpulan.....	83
E. Tempat dan Waktu Penelitian	84
1. Tempat Penelitian	84
2. Waktu Penelitian.....	86
BAB IV: ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN BPSK DALAM	
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN....	88
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung	
Nomor 79 K/ Pdt.Sus-BPSK/2024 atas Pembatalan Putusan BPSK	
yang Final dan Binding.....	88
B. Peran BPSK dalam Melindungi Konsumen dalam Sengketa	
Perjanjian Kredit Terkait Pembatasan Kewenangan oleh	
Mahkamah Agung.....	100
1. BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	100
2. BPSK sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Efektif.....	103
3. Kewenangan BPSK dalam UU Perlindungan Konsumen	106
C. Implikasi Hukum dari Pembatalan Putusan BPSK dalam Putusan	
Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2024	109
1. Penurunan Kepercayaan Publik terhadap BPSK	109
2. Ketidakpastian dan Kekosongan Perlindungan Hukum	115
3. Beban Tambahan bagi Sistem Peradilan Umum.....	117
4. Pelemahan Otoritas dan Kredibilitas BPSK	120
5. Dampak Psikologis terhadap Konsumen	123
6. Peluang Penyalahgunaan oleh Pelaku Usaha.....	126
7. Urgensi Reformasi Hukum dan Penguatan Kelembagaan.....	130
8. Sinkronisasi antara Sistem Peradilan dan ADR.....	136
BAB V: PENUTUP	142
A. Simpulan	142
1. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	142
2. Implikasi Hukum	142

B. Saran/Rekomendasi	143
DAFTAR PUSTAKA.....	145
DAFTAR LAMPIRAN	156
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan	
BPSK dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-BPSK/2024	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	164

